

# LAPORAN PENELITIAN

**PEMBELAJARAN ILMU-ILMU FIQIH  
DALAM MEMBENTUK NALAR KEILMUAN PESERTA DIDIK  
(Studi Kasus di STAIN Bengkulu)**



Oleh:  
Drs. Zulkarnain S, M.Ag  
Dr. Moh Dahlan, M.Ag  
Saepudin, S.Ag, M.Si

Dibiayai Oleh:  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
STAIN Bengkulu Nomor: 4094/025-01.2/VIII/2010

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) BENGKULU  
2010**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Rumusan Masalah .....	14
c. Tujuan Penelitian.....	15
d. Manfaat Penelitian.....	15

### BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Konsep pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih.....	16
1. Pengertian Pembelajaran Fiqih .....	16
2. Konsepsi Fiqih dan Syari'ah .....	17
3. Sumber Pengetahuan Fiqih.....	19
4. Dasar dan tujuan pembelajaran Fiqih.....	25
5. Materi Pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih.....	29
6. Metode Pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih.....	29
B. Unsur-unsur Pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih .....	31
C. Orientasi Pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih dalam Membentuk Nalar Keilmuan Peserta.....	36

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian .....	42
B. Metode Pengumpulan Populasi dan Sampel .....	43
C. Metode Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	47
E. Sistematika Pembahasan .....	48

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	49
B. Penyelenggaraan Pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih Prodi Hukum Islam PPs STAIN Bengkulu.....	71
C. Pengaruh Pembelajaran Fiqih dalam Pembentukan Nalar Keilmuan Mahasiswa.....	74
D. Faktor Penunjang dan Penghambat Pembelajaran Ilmu-ilmu Fiqih dalam Pembentukan Nalar Keilmuan Mahasiswa.....	97

**BAB V PENUTUP**

**BAB I**

A. Kesimpulan .....104  
B. Sara-saran.....105

**A. LATAR BELAKANG**

Sejumlah perusahaan yang telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan di era digital ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang memadai. Banyak perusahaan yang belum memiliki tenaga kerja yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerjanya. Dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerjanya.

1. Lantieri, M. (2018). *Strategic Management: A Case Study Approach*. London: Pearson Education Limited.  
2. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating Unique Value in the New World of Business*. New York: Free Press.  
3. Prahalad, C. K., & Ramamoorti, V. (2003). *The Strategy First*. Boston: Harvard Business School Press.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejumlah penemuan baru akal pikiran manusia telah mengubah tatanan hidupnya sendiri. Perubahan itu juga menjadi indikator keberhasilannya dalam menggantikan peran alam semesta yang pada awalnya alam semesta hadir sebagai mitranya sekarang telah menjadi objek eksploitasi demi kontinuitas hidup manusia dan kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, manusia terpesona dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kerja akal pikirannya. Karena adanya berbagai kemudahan dalam menjalankan hidupnya berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia lalu terjebak pada penunahan terhadap "akal pikirannya" sendiri, sehingga ada reduksi terhadap realitas alam, termasuk agama bersama elemen spiritualnya.<sup>2</sup>

Keterpesonaan manusia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakhir pada penunahan akal

---

<sup>1</sup> Nurhamzah, Absurditas Manusia Modern : Sebuah Rekonstruksi Spiritual Manusia Modern, Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* Diktis Depag RI Jakarta di Grand Hotel Lembang Jawa Barat pada tanggal 26 - 30 Nopember 2006, h. 3.

<sup>2</sup> Ibid.

pikirannya telah membawa dampak negatif berupa kerakusan dan kesembronoan dalam mengelolah alam semesta beserta isinya. Walaupun demikian diakui bahwa penemuan teknologi berupa alat transportasi, telekomunikasi dan informasi telah merengkus dan melipat ruang dan waktu yang jauh dan luas menjadi semakin sempit. Inilah pelipatan dunia berkat hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dengan segala kompleksitasnya telah melahirkan kegelisahan tersendiri bagi pemerintah yang kemudian berwujud Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang di dalamnya berisi perubahan kebijakan yang sentralistik menjadi desentralistik dengan alasan tidak mungkin semua persoalan dikerjakan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan lebih banyak lagi, termasuk dalam mengelolah bidang pendidikan. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penbenahan dan pembangunan pendidikan yang berkualitas di daerahnya sesuai dengan garis kebijakan pendidikan nasional. Sebab, pendidikan setidaknya memiliki empat peranan penting dalam kehidupan umat manusia.

---

<sup>3</sup> Ibid.; Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 1-5.

*Pertama*, pendidikan merupakan upaya nyata untuk memfasilitasi individu lain, dalam mencapai keindependirian serta kematangan mentalnya sehingga dapat *survive* di dalam kompetisi kehidupannya. *Kedua*, pendidikan adalah pengaruh bimbingan dan arahan dari orang dewasa kepada orang lain, untuk menuju kearah kedewasaan, kemandirian serta kematangan mentalnya. *Tiga*, pendidikan merupakan aktivitas untuk melayani orang lain dalam mengeksplorasi segenap potensi dirinya, sehingga terjadi proses perkembangan kemanusiaannya agar mampu berkompetisi di dalam lingkup kehidupannya (Insan Cerdas dan Kompetitif). *Terakhir*, pendidikan adalah usaha sadar yang sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi (fitrah) yang ada dalam diri manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya (insan kamil).<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, pembenahan dan perbaikan pendidikan yang berkualitas ini perlu dilaksanakan secara sistematis dan juga diseimbangkan antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pembangunan Iman dan Takwa (IMTAK) pada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembenahan dan perbaikan pendidikan ini perlu dilakukan karena kualitas bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang tidak jarang telah menimbulkan berbagai kerumitan dan bahkan konflik fisik. Beragam berita hampir setiap hari terpusat pada tindak kekerasan, kejahatan, perselingkuhan, dan korupsi.

---

<sup>4</sup> Gustiana Isya Marjani, "Multikulturalisme dan Pendidikan: Relevansi Pendidikan dalam Membangun Wacana Multikulturalisme di Indonesia" dalam Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* Diktis Depag RI Jakarta di Surakarta 2 - 5 Nopember 2009, h. 4.

Fenomena ini telah banyak menyita pikiran para akademisi untuk mencari akar-akar masalah tersebut yang hingga kini belum ditemukan teknis penyelesaiannya, bahkan yang ada malah kontroversi pendapat di antara mereka, ada sebagian yang mempersalahkan jam pelajaran Agama Islam yang sedikit dan ada juga yang mempertanyakan isi Pendidikan Agama Islam yang terlalu banyak topik dan bersifat kognitif-hafalan, sedang pengamalannya kurang mendapat perhatian.

Fenomena ini juga menjadi perhatian serius pihak pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (sebelumnya Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama) yang menginventarisasi masalah-masalah pendidikan agama Islam sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam hanya menfokuskan diri pada penguasaan materi dengan kompetensi utamanya hafalan, sedang penghayatan dan pengamalan pendidikan agama Islam tidak mendapat perhatian.
2. Dalam masalah hubungan manusia dengan Allah swt dan kesuksesan pendidikan hanya diukur dalam kerangka formalitas saja

---

<sup>5</sup> Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008); Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), h. 4;.

3. Pendidikan agama Islam tidak diupayakan menjadi dasar keilmuan bagi mata pelajaran lain.
4. Pendidikan agama belum mewarnai karakter kehidupan peserta didik/mahasiswa.
5. Penghargaan yang lemah terhadap kondisi lingkungan mengakibatkan lemahnya kepekaan mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan hidup. Akibatnya, peserta didik tidak peka terhadap fenomena lingkungannya.
6. Penalaran kritis tidak berkembang optimal, bahkan cenderung mengalami dogmatisasi pendidikan agama, sementara pembelajaran yang baik seharusnya memberikan ruang yang terbuka terhadap peserta didik untuk berpikir dan berkreasi.

Dalam masalah pendidikan agama, ia sudah digariskan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, sila pertama Pancasila, yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Karena itu, pendidikan bangsa ini juga mencerminkan falsafah hidupnya yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan potensi peserta didik ini menjadi tanda bahwa pendidikan (agama) harus memperhatikan latar belakang peserta didik yang beragam, sehingga proses pembelajaran itu mampu mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan kondisi dan situasi yang mengitarinya.<sup>6</sup> Dalam pembelajaran ini, peserta didik harus berpartisipasi aktif karena peserta didik yang mengalami proses belajar, sedangkan dosen hanyalah berperan sebagai fasilitator yang bertugas memberikan pengarahan, pembimbingan, dan pemberi motivasi.

Guru (dan dosen, pen)hanya mengambil peran dalam perencanaan untuk memberi peluang pada siswa-siswanya (*peserta didiknya*, pen) untuk mengembangkan aktivitas belajar, serta mengeksplorasi berbagai pengalaman baru untuk mencapai berbagai kompetensi yang diidealkannya, dan telah menjadi kesepakatan-kesepakatan kelas bersama guru. Bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan tersebut tampaknya paradigma *behaviourisme* sudah mulai dikritik dengan dikembangkannya aliran *constructivisme* sebagai pengembangan dari aliran psikologi kognitif. Aliran *behaviourisme* memandang bahwa belajar mengubah perilaku *peserta didik* tidak bisa mnejadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tugas guru adalah mengontrol stimulus dan lingkungan belajar agar perubahan mendekati tujuan yang diinginkan..... sedangkan aliran *constructivisme* ...menekankan teorinya bahwa *peserta didik* amat berperan dalam membentuk ilmu baru.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran...*, hlm. 201-29.

<sup>7</sup>Dede Rosada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 94

Dalam realitas budaya yang plural seperti di Indonesia, proses pembelajaran perlu memperhatikan aspek-aspek pluralitas itu, tidak terkecuali teknik dan orientasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Karena itu, teknik dan orientasi pembelajaran yang perlu diterapkan di Indonesia adalah pembelajaran yang berbasis (muatan) multikultural sebagai wahana untuk menciptakan peserta didik yang cakap dalam menjawab kerumitan keragaman budaya dan agama bangsa ini.

Dalam kehidupan bangsa di masa kini, pendidikan agama menghadapi perubahan yang begitu pesat, sehingga tenaga pengajar/dosen harus memiliki perangkat pembelajaran yang begitu memadai untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kapasitas keilmuan dan kecakapan dalam menghadapi kemajemukan hidup masyarakat. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembelajaran tersebut, ada dua hal yang harus dilakukan tenaga pengajar, yakni: *Pertama*, tenaga pengajar harus memahami isu-isu aktual yang berkembang di dalam kehidupan keagamaan dan budaya. *Kedua*, tenaga pengajar harus mampu memberikan arahan, pembimbingan dan pemberi motivasi agar peserta didiknya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kemajemukan hidup agama dan budaya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Salah satu isu aktual dalam masalah pendidikan di Indonesia adalah masalah multikulturalitas karena bangsa Indonesia bersifat majemuk. Subhi Azhari, "Wajah Multikulturalisme Kampus Islam", dalam *Jurnal Perta*, No 01 Tahun 2006, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Jakarta, hlm. 6-7.

Kompetensi guru tersebut memiliki arti penting untuk mewujudkan lahirnya peserta didik yang memiliki kesadaran keberagaman yang kokoh dan sekaligus mampu menghargai keragaman budaya. Dalam penelitian ini, landasan normatif (ayat-ayat al-Qur'an) juga memiliki pengaruh besar dalam memberikan inspirasi pendidikan agama Islam di era multikultural<sup>9</sup>

Pendidikan multikultural memiliki prinsip bahwa orientasi pembelajaran harus memperhatikan latar belakang peserta didik yang majemuk di kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini diharapkan dapat mendukung dan memperluas wawasan peserta didik dalam kondisi dan situasi kehidupan yang majemuk.<sup>10</sup> Pendidikan multikultural ini menawarkan sebuah gagasan bahwa semua peserta didik tanpa melihat latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencari ilmu di lembaga pendidikan.<sup>11</sup>

Kerangka konseptual pendidikan tersebut pada dasarnya lahir dari realitas sistem pendidikan yang bersifat diskriminatif terhadap

---

<sup>9</sup> H.A.R., "Tilaar Multicultural Education and Its Challenges in Indonesia", makalah pada *International Seminar on Multicultural Education, Cross Cultural Understanding for Democracy and Justice*, (Yogyakarta 26-26 Agustus 2005), h. 8.; Bandingkan dengan Sangkot, *Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Nopember, 9 2007).

<sup>10</sup> Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society*, (Columbus: Merrill an imprint of Prentice Hall, 1998), h. 3; Bandingkan dengan Sangkot, *Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Nopember, 9 2007).

<sup>11</sup> Jack Levy "Multicultural Education and Democracy in the United State", makalah pada *International Seminar on Multicultural Education, Cross Cultural Understanding for Democracy and Justice*, (Yogyakarta 26-26 Agustus 2005), h. 8; Bandingkan dengan Sangkot, *Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Nopember, 9 2007)..

peserta didik dari etnis tertentu di wilayah Amerika. Kenyataan ini kemudian mengundang perhatian khusus dari pihak pemerintah.<sup>12</sup>

Sementara itu sistem pendidikan dan pembelajaran yang diterapkan di Asia, termasuk Indonesia, berbeda, sebab sejak awal tidak ada diskriminasi radikal di dalam kelas. Sedangkan pemilahan ruang kelas antara peserta didik laki-laki dan wanita pada lembaga pendidikan Islam tertentu, bukan berarti sebagai tindakan diskriminatif, melainkan sebagai tindakan antisipasi terhadap kenakalan dan pelanggaran moral. Karena itu, orientasi pembelajaran berbasis multikultural memusatkan perhatian pada gagasan dasar yang membicarakan pentingnya memahami dan menghormati keragaman budaya dan agama.

Pendidikan multikultural memandang masyarakat secara lebih luas lagi. Berawal dari pandangan dasar bahwa sikap *indifference* dan *non-recognition* berakar tidak hanya dari ketimpangan struktural rasial, maka paradigma pendidikan multikultural mencakup hala-hal tentang ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Endang Turmudi, "Pendidikan Multikultural di Indonesia dan Tantangannya" makalah yang dipresentasikan pada *International Seminar on Multicultural Education Cross Cultural Understanding for Democracy and Justice*, (Yogyakarta 26-26 Agustus 2005), h. 1; Bandingkan dengan Sangkot, *Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Nopember, 9 2007).

<sup>13</sup> Gustiana Isya Marjani, "Multikulturalisme dan Pendidikan: Relevansi Pendidikan dalam Membangun Wacana Multikulturalisme di Indonesia" dalam Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* Diktis Depag RI Jakarta di Surakarta 2 - 5 Nopember 2009, h. 5-6.

Seperti Azyumardi Azra menggariskan bahwa istilah "pendidikan multikultural" dapat digunakan pada tingkat deskriptif ataupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural harus mengcover subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan yang universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.<sup>14</sup>

James A. Banks memberikan pengertian tentang Pendidikan Multikultural sebagai konsep, idea tau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara.<sup>15</sup>

Dalam konteks pluralitas agama, penerimaan adanya *the common vision* ini berarti menghubungkan kembali *the many* dalam hal ini realitas eksoteris agama-agama, pada asalnya *The One*, Tuhan, yang diberi berbagai macam nama oleh para penganut berbagai agama sejalan dengan perkembangan kebudayaan, kesadaran sosial dan spiritual manusia, sehingga kesan empiris tentang adanya agama-agama yang plural itu tidak hanya berhenti sebagai fenomena faktual saja. Namun, hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyamaan

---

<sup>14</sup> Gustiana Isya Marjani, "Multikulturalisme dan Pendidikan: Relevansi Pendidikan dalam Membangun Wacana Multikulturalisme di Indonesia" dalam Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* Diktis Depag RI Jakarta di Surakarta 2 - 5 Nopember 2009, h. 6.

<sup>15</sup> Gustiana Isya Marjani, "Multikulturalisme dan Pendidikan: Relevansi Pendidikan dalam Membangun Wacana Multikulturalisme di Indonesia" dalam Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* Diktis Depag RI Jakarta di Surakarta 2 - 5 Nopember 2009, h. 6.

persepsi bahwa ada satu Realitas yang menjadi pengikat yang sama dari agama-agama tersebut, yang dalam bahasa simbolis disebut "agama".<sup>16</sup>

Salah satu hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mengembangkan pemahaman agama yang berwawasan multikultural adalah dengan menyelektirakan pembelajaran pendidikan agama Islam, tepatnya pembelajaran ilmu-ilmu fiqh multikultural, karena hal ini memberikan manfaat luar biasa untuk mengarahkan orientasi ibadah seseorang menjadi benar dan sekaligus memiliki kepekaan terhadap keragaman agama dan budaya. Pembelajaran ilmu-ilmu fiqh di sini dimaksudkan sebagai upaya mengubah tingkah laku peserta didik menjadi terbuka setelah menerima, menanggapi, dan menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan oleh tenaga pengajar.<sup>17</sup> Pembelajaran fiqh ini bertujuan membentuk kepribadian peserta didik/mahasiswa yang mampu menjalankan amal ibadah secara baik dan benar dalam konteks kehidupan keagamaan dan budaya yang plural di Indonesia.<sup>18</sup> Walaupun mata kuliah ilmu-ilmu fiqh yang diberikan memiliki muatan multikultural, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa

---

<sup>16</sup> Masykur, "Pola Komunikasi Antar Umat Beragama Studi atas Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten", Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference* di Grand Hotel Lembang Jawa Barat pada tanggal 26 - 30 Nopember 2006, h. 8.

<sup>17</sup> Lihat M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Sekolah Dengan Dirumah Tangga*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 172.

<sup>18</sup> Zakiyah Darajat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta : Gunung Agung, 1986), h. 114.

pembelajaran ilmu-ilmu fiqih yang dilaksanakan di Prodi Hukum Islam PPs STAIN Bengkulu dapat melahirkan varian nalar keilmuan mahasiswa/peserta didik, tidak mesti berwawasan multikultural, tetapi bisa jadi berwawasan monokultural.

Dengan demikian pendidikan/pembelajaran yang diterapkan di ruang kuliah berorientasi pada penanaman kesadaran yang inklusif atau nalar kritis, yakni memberikan ruang bagi peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada dan mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur lembaga itu dibangun. Karenanya, proses pembelajaran seharusnya dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat melihat sistem yang menjadi sasarannya untuk membuka sistem yang membelenggu dirinya.

Sebagai contoh munculnya keterasingan karena diskriminasi peran kelompok minoritas dalam kelompok mayoritas masyarakat atau munculnya keterasingan seseorang karena kemiskinan dilihat karena adanya sistem realitas yang mengitarinya tidak memungkinkan seseorang untuk dapat keluar dari gubangan sistem yang membelenggu. Biasanya dalam diskriminasi menandakan adanya penindasan, peminggiran dan ketidakadilan sosial. Karena adanya unsur superioritas kelompok atau sistem terhadap kelompok lainnya. Ada banyak faktor mengapa pendidikan sering ditampilkan dalam corak diskriminatif. Salah satunya adalah adanya klaim kebenaran yang tidak disertai dengan adanya pemahaman kemajemukan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Ali Riyadi, "Studi Islam dan Radikalisme Pendidikan dalam Konteks Masyarakat Majemuk" dalam Makalah dibentangkan dalam acara *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* Diktis Depag RI Jakarta di Surakarta 2 - 5 Nopember 2009, h. 4.